

BAB II

KERANGKA TEORI

Teori dalam penelitian kualitatif, digunakan dengan tujuan yang berbeda-beda, misalnya; teori dimanfaatkan sebagai bahan pisau analisis untuk memahami persoalan yang diteliti; teori menyediakan konsep-konsep yang relevan dan asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan, membantu dalam memberi makna terhadap data; teori juga berfungsi untuk menganalisis, menjelaskan, dan memprediksi suatu objek tertentu. Maka, dalam penelitian ini teori dimanfaatkan sebagai pisau analisis untuk memahami, menjelaskan permasalahan yang diteliti, agar diperoleh makna dan dapat diperoleh

prediksi terhadap fenomena ke depan. Dengan kata lain, teori digunakan untuk memperjelas, memperdalam serta memperdebatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian.

Selain itu, teori juga dapat digunakan sebagai perspektif. Prespektif, digunakan untuk memandu peneliti dalam merumuskan masalah, memberi pegangan ketika mengumpulkan dan menganalisis data serta membentuk *call for action and change*, serta memberi kerangka berfikir pada peneliti pada isu-isu penting yang perlu diteliti (Creswell, 2014: 93-94). Perspektif teoritis dapat digunakan peneliti kualitatif untuk meneliti gender, kelas dan ras (dan bisa tentang isu yang berkaitan dengan kelompok-kelompok marginal).

Prespektif feminisme dimanfaatkan untuk memperlihatkan dengan bagaimana *researcher* harus memposisikan diri dalam penelitian kualitatif (misalnya berada di luar atau tidak condong pada konteks pribadi dan kultural perempuan politisi di Jawa Tengah). Teori feminisme, menjadi pisau analisis ketika menyelesaikan persoalan-persoalan riset yang terfokus pada peran dan posisi perempuan di semua aspek kehidupan. Prespektif dan teori feminisme dimanfaatkan untuk membedah perempuan dalam pemilihan legislatif di Jawa Tengah, yang sampai saat ini masih menghadapi persoalan dalam politik.

Teori feminisme eksistensialisme dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk memperdalam analisis data temuan di lapangan mengenai perempuan, perilaku, eksistensi mereka ketika berada dalam arena rekrutmen legislatif, baik ketika masih di partai politik maupun ketika berhadapan dalam masyarakat.

Eksplorasi terhadap perempuan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah, dilihat dari keberadaan perempuan sebagai agen, yakni individu dengan segala kemampuan, kapabilitas mereka dan struktur-struktur yang memberi pengaruh dalam proses rekrutmen politik di Jawa Tengah. Teori Agen-Struktur yang dijelaskan oleh Antony Giddens dan Pierre F. Bourdieu. Dalam perkembangan ilmu, pendapat keduanya mengenai agen dan struktur, dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani perdebatan antara kubu struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis tentang suatu fenomena sosial.

Giddens dan Bourdieu berpendapat bahwa hubungan agen dan struktur tergambar dari relasi keduanya. Struktur dapat ditemui pada dalam dunia sosial. Ia berpendapat bahwa struktur objektif adalah hal yang independen, lepas dari kesadaran dan kehendak para agensi yang dapat membimbing serta memberi batasan praktik dan representasinya. Selain teori di atas, teori rekrutmen juga diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Dimanfaatkan untuk menganalisis keikutsertaan perempuan dalam kancah politik di Jawa Tengah, dengan segala kemampuan mereka dapat masuk dalam proses rekrutmen partai politik dan berhasil memenangkan suara dalam pemilihan yang mereka ikuti.

2.1. Perspektif dan Teori Feminisme

Perspektif adalah sudut pandang memaknai sesuatu. Seperti yang dimaksud dalam riset ini, perspektif feminis pada ilmu politik lebih sering terfokus pada masalah/persoalan seperti diferensial konstruksi gender dalam representasi atau partisipasi

politik. Penelitian dengan perspektif feminisme sering dilakukan di dalam perbedaan yang mendasar antara laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*) serta akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbedaan dalam dunia nyata/ kehidupan sosial politik. Fokus penelitian dengan perspektif feminisme, berupaya mengatasi perbedaan tersebut kepada keterbukaan untuk menunjukkan posisi subordinat kaum perempuan dan untuk menjelaskan sistem ekonomi dan politik dunia yang dilihat penuh diskriminasi terhadap posisi perempuan (Karim, 2014:57). Selain itu, riset berperspektif feminisme juga dilakukan untuk menggali persepsi dan pengalaman perempuan secara individu maupun kelompok.

Perspektif feminisme menjadi pendekatan dalam penelitian ini, untuk mengeksplorasi persoalan empirik kurangnya keterwakilan perempuan seperti yang terjadi dalam Pemilihan Legislatif tahun 2004, 2009, dan 2014 di Jawa Tengah. Fokus pada perempuan yang memiliki kemampuan, kapabilitas dalam berpolitik dalam tiga periode pemilihan legislatif di Jawa Tengah yang dikenal sebagai masyarakat dengan budaya patriarki. Kaum feminis berkeyakinan bahwa hal-hal yang bersifat politis tentang kehidupan pribadi dan kehidupan privat (domestik), didasarkan atas hubungan kekuasaan yang tidak seimbang selama ini. Ia menempatkan perempuan secara tidak adil dan juga mempunyai kekuasaan terhadap perempuan dan juga mempunyai kekuasaan atas perempuan (Lovenduski, 2008: 33). Feminisme dalam pandangan para ahli feminis memiliki beragam makna, misalnya oleh Linda Gordon yang mengartikan feminisme sebagai “*an analysis of women’s subordination for the purpose of figuring out how to change it*” (suatu analisa terhadap subordinasi perempuan sebagai tujuan

untuk mencari tahu bagaimana mengubahnya), sebagai *sharing* dorongan-dorongan untuk meningkatkan kuasa, dan otonomi perempuan dalam keluarga, atau masyarakatnya). Gordon juga mendefinisikan feminisme sebagai “*critique of male supremacy, formed and offered in the light of a will to change it*” (kritik atas supremasi laki-laki yang dirupakan dan ditawarkan dalam cahaya kehendak untuk merubahnya). Jadi dari arti katanya, feminisme berarti advokasi dan gerakan yang berupa dorongan untuk memajukan, mendukung persamaan hak bagi perempuan (Fineman, Martha Albertson, 2005).

Berbeda dengan ajaran *isme* produk lainnya, diskursus/ wacana feminisme tidak menggunakan *grand-theory* yang monolitik menurut Bashin dan Khan (1988), sehingga tidak ada suatu standar tunggal yang rigid dengan aplikasinya. Dengan demikian feminisme dimaknai secara beragam dalam konteks ruang dan waktu serta secara sosio-kultural yang *indigenous*, asal ia merupakan aksi/ gerakan yang berangkat dari kesadaran mengenai terjadinya penindasan baik fisik dan mental terhadap perempuan dalam masyarakat. Selanjutnya, kesadaran ini memicu, memotivasi adanya suatu aksi dari perempuan atau laki-laki untuk dengan sengaja merubah keadaan tersebut (Fakih, et.al., 2000: 234). Diakui ataupun tidak, feminisme telah menjelma sebagai suatu fenomena yang mendesak kemapanan patriarki yang telah mendiskreditkan kehadiran perempuan. Harkat dan martabat kemanusiaan perempuan. Kesadaran ini, lalu memunculkan paradigma baru yang lebih harmonis untuk laki-laki dan perempuan, serta merumuskan identitas gender yang tidak terlalu tajam terpolarisasi pada dua perbedaan yakni yang superioritas dan inferior.

Dalam perkembangannya, teori feminisme dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah penelitian yang bertumpu pada peran dan posisi perempuan pada semua aspek kehidupan. Teori ini dimanfaatkan, sebagai pisau bedah pada terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Setelah berabad-abad dihilangkan, tersingkir, serta diremehkan oleh disiplin ilmu patriarki, kajian feminisme kemudian kembali berusaha masuk menjadi bahan objek penyelidikan. Teori-teori tradisional, ada kalanya dimodifikasi oleh kaum feminis untuk menerangkan penindasan perempuan. Dengan memusatkan pada pencantuman persamaan perempuan ke dalam kerangka teoritik masa lalu, kesamaan-kesamaan perempuan dan laki-laki ditekankan (Pateman & Grosz, 1986: 194).

Demikian perkembangan feminisme semakin populer dengan perdebatan-perdebatan di kalangan perempuan dan antara kalangan perempuan dan laki-laki secara teoritik, tentang ide-ide mengenai kesetaraan dan perbedaaan seksual/ biologis. Pemenuhan kepentingan ini memerlukan karakter manusia yang ekspresif yakni rasional, kompetitif dan mampu merubah keadaan diri mereka dan bahkan lingkungannya. Gerakan feminisme yang mendasarkan paham materialisme dan pola relasi konflik berkembang dan terbagi dalam kelompok-kelompok feminis sesuai dengan ideologi, tujuan mereka masing-masing, diantaranya gerakan feminisme sosialis, radikal dan liberal seperti yang dikemukakan oleh Anderson M. (1983) yang dikutip oleh Megawangi (Fakih, et.al., 2000: 222-229).

Terdapat beberapa poin penting mengenai feminisme sebagai teori, yakni; (1) digali dari pengalaman spesifik perempuan dan menunjukkan perjalanan sosial menuju

emansipasi dan pencapaian kaum perempuan, (2) Secara umum, feminisme diartikan sebagai kesadaran terhadap penindasan dan pemerasan perempuan yang dibentuk oleh sistem sosial yang tidak adil, yaitu perbedaan jenis kelamin, dominasi laki-laki dan sistem patriakat, (3) Feminisme tidak hanya tentang memahami dan menyadari, namun juga mengubah keadaan tersebut dengan aksi riil (Agustina dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus, 2005:378). Ben Agger (1998) menjelaskan bahwa prestasi besar dari teori feminisme adalah tidak hanya tentang kognitif saja, pemahaman saja, namun juga tentang tindakan, (4) Secara lebih luas, feminisme merupakan beberapa gerakan sosial, budaya dan politik, seperangkat teori dan filsafat moral yang terkait dengan ketidaksetaraan gender dan deskriminasi terhadap perempuan, (5) Didalam feminisme terkandung adanya ideologi feminitas yaitu ideologi yang memiliki ciri kedamaian, keselamatan, kebaikan dan kebersamaan. Ferminitas tidak mutlak hanya dimiliki oleh kaum perempuan (Djelantik, dalam Sastriyani (ed), 2009:102).

Menarik menelisik apa yang oleh Beauvoir mengenai Feminisme dalam beberapa konsep yang diusungnya mengenai perempuan dan laki-laki. Simone Ernestine Lucia Marie Bertnand de Beauvoir (1966), seorang tokoh feminis eksistensialis mendesak para perempuan untuk melangkah, keluar dari batasan-batasan dan lingkaran yang didefinisikan secara sosial yang membuat kaum perempuan menjadi “*liyan*” (*the other*). *The other* yang dimaksud adalah laki-laki yang terutama memiliki kapasitas manusiawi untuk melakukan transenden dan kemampuan untuk menunjukkan kehendak individualnya kepada dunia (Turner, 2012: 397). Mengapa demikian? Karena menurut Beauvoir dalam bukunya yang berjudul *The second Sex* perempuan

digambarkan sebagai sosok, makhluk yang menghabiskan hidup mereka mengikuti jejak laki-laki, selamanya dengan senang hati, melakukan perintah-perintah mereka dan menerima begitu saja definisi-definisi mereka tentang realitas. Selain itu, perempuan terpecah-pecah di kalangan mereka sendiri dan tidak habis-habisnya bersaing untuk mendapatkan akses laki-laki.

Beauvoir terlibat dalam banyak perjuangan feminisme Eropa dan Prancis dalam mewujudkan kontrol yang mandiri kaum perempuan atas teknologi reproduksi. Ia tidak kehilangan komitmennya terhadap ide bahwa bahasa dan kecerdasan adalah netral-gender; baginya tidak ada sesuatupun yang disebut sebagai bahasa perempuan, dan cara laki-laki dan perempuan berfikir harus dipandang sama. Kekuatan dan daya tarik feminisme menurut Beauvoir adalah peluang-peluang dan kemungkinan-kemungkinan yang dibukanya bagi keunggulan feminitas. Feminisme adalah selebrasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Sifat keduanya adalah tetap dan tidak mungkin diubah.

Konsep narsis yang diusung oleh Beauvoir adalah dampak dari *ke-liyan-annya*. Perempuan selalu merasa putus asa sebagai subjek, karena perempuan tidak diperkenankan untuk ikut terlibat dalam kegiatan mendefinisikan diri dan oleh kegiatan feminimnya tidaklah memberikan kepuasan (Tong, 2016: 267). Karena tidak dapat memberikan kepuasan terhadap dirinya melalui proyek dan tujuannya, perempuan dituntut untuk menemukan realitasnya dalam imanensinya sebagai seorang manusia. Pada tahap berikutnya, yang terjadi adalah perempuan menjadikan dirinya sebagai sosok yang penting, karena tidak ada objek penting yang dapat ia akses. Perempuan kemudian menjadi objek pentingnya sendiri. Mempercayai dirinya sebagai suatu objek

(keyakinan yang ditegaskan kebanyakan orang sekitarnya) perempuan terpesona oleh, dan bahkan mungkin menjadi obsesif terhadap citranya sendiri: wajah, tubuh dan pakaiannya. Rasa menjadi subjek dan objek pada saat yang bersamaan, tentu saja merupakan ilusi semata. Seorang narsis dengan cara tertentu yakin bahwa ia merupakan sintesis mustahil dari ada untuk dirinya sendiri dan ada pada dirinya sendiri.

Menurut Beauvoir, pada awalnya narsis menguntungkan bagi perempuan, untuk membangun keberanian mereka, ego mereka. Namun pada akhirnya narsis dapat menghambat diri perempuan untuk maju. Narsis membuat perempuan menjadi terikat pada kebutuhannya dalam memenuhi selera masyarakat dan menyesuaikan diri mereka terhadap hasrat laki-laki. Perempuan dengan penghargaan dirinya, bergantung kepada persetujuan laki-laki, masyarakat terhadap dirinya. Ia hanya cantik jika masyarakat menyatakan bahwa ia memiliki kecantikan. Ia sendiri tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk menyatakan kecantikan dan atau kesuksesannya (Tong, 2016: 272-273).

Akhirnya Beauvoir membuat simpulan tentang tragedi dari kesemua peran adalah bahwa semua itu bukanlah konstruksi yang dibangun oleh perempuan sendiri. Karena perempuan bukanlah yang membangun dirinya sendiri, perempuan kemudian diumpamakan untuk mendapat persetujuan dari dunia maskulin dalam masyarakat produktif. Sesungguhnya perempuan dikonstruksi oleh laki-laki, melalui struktur dan lembaga laki-laki. Namun, karena perempuan dan laki-laki tidak mempunyai esensi, perempuan tidak harus meneruskan untuk menjadi apa yang diinginkan laki-laki.

Untuk menghindarkan diri dari imanensi perempuan yakni adanya pembatasan, definisi dan peran dalam masyarakat, kepatutan yang ditekan oleh laki-laki tentu bukan hal yang mudah. Meskipun demikian, jika perempuan ingin berhenti diperlakukan sebagai jenis kelamin kedua, *liyan*, perempuan harus dapat mengatasi apa yang terjadi padanya dari lingkungan. Perempuan harus memiliki pendapat dan cara seperti juga laki-laki. Dalam proses menuju transendensi, ada empat strategi yang dapat dilakukan perempuan, menurut Beauvoir (Tong, 2016: 273-276); (1) perempuan bisa bekerja. Walaupun membutuhkan perjuangan, pekerjaan memberi berbagai kemungkinan bagi perempuan, jika tidak dilakukannya, mereka akan kehilangan kesempatan sama sekali. Dengan bekerja, perempuan dapat memperoleh transendensinya. Mereka akan secara konkrit menegaskan statusnya sebagai subjek, sebagai orang yang aktif menentukan arah nasibnya. (2) Perempuan dapat menjadi seorang intelektual, anggota dari suatu kelompok yang akan membangun perubahan bagi perempuan. Kegiatan intelektual, adalah kegiatan ketika seseorang berfikir, melihat, dan mendefinisikan, dan bukanlah nonaktivitas ketika seseorang menjadi objek pemikiran, pengamatan dan pendefinisian. (3) Perempuan dapat bekerja untuk mencapai transformasi sosial masyarakat. Mereka dapat menolak menginternalisasi ke-*liyan*-annya yaitu dengan mengidentifikasi dirinya melalui pandangan kelompok dominan dalam masyarakat. (4) perempuan harus membebaskan dirinya dari tubuhnya. Daripada memperhatikan kecantikannya, mereka dapat menggunakan waktu dengan melakukan kegiatan yang lebih kreatif dan lebih berorientasi untuk memberi layanan kepada publik.

2.2. Teori Agen - Struktur

2.2.1. Agen-Struktur Menurut Antony Giddens

Giddens mencari pertautan atau *linkage* setelah terjadinya pembedaan dan pertentangan yang tajam antara struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis. Dualisme yang telah terjadi antara agen-struktur secara teoritik, disebabkan karena pandangan struktur-fungsional yang terjebak dalam pandangan naturalistik. Giddens tidak merasa puas dengan teori pandangan yang dikemukakan oleh struktural-fungsional, yang menurutnya terjebak pada pandangan naturalistik. Pandangan naturalistik mereduksi aktor dalam struktur, kemudian sejarah dipandang secara mekanis, dan bukan suatu produk kontengensi dari aktivitas agen. Tetapi Giddens merasa tidak sependapat dengan konstruksionisme-fenomenologis, yang baginya disebut sebagai berakhir pada imperialisme subjek. Oleh karenanya ia ingin mengakiri klaim-klaim keduanya dengan cara mempertemukan kedua aliran tersebut.

Giddens dalam Teori Strukturasi, menyatukan dua pendekatan yang berseberangan tersebut dengan melihat hubungan dualitas (hubungan timbal balik) antara agen-struktur dalam praktik sosial. Giddens menjelaskan gagasan keagenan dapat dianggap melambangkan apa yang kini didukung oleh sejumlah besar teoritikus (Ritzer & Smart, 2015: 693). Agen (pelaku) pada strukturasi adalah “orang-orang yang konkret dalam arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia. Sedangkan struktur sendiri telah didefinisikan sebagai aturan dan sumber daya yang digunakan oleh agen dalam interaksi (Giddens, 2003). Keagenan adalah kapasitas individu untuk bertindak lain. Individu bukanlah si dungu terhadap aturan, bahwa individu ‘punya keagenan’ dalam

arti sempit spesifik menjadi aktif dalam berhubungan dengan norma dan aturan dan bukan cuma tunduk begitu saja.

Visi aktual Giddens terhadap keagenan jauh mengalahkan kebutuhan; visi itu lebih luas, jenis visi yang sering dipikirkan dalam kehidupan sehari-hari tentang seseorang sebagai agen bebas. Keagenan dalam arti luas adalah kekuasaan merdeka manusia individu untuk turut campur dalam arus peristiwa yang berlangsung terus menerus dan membuat perubahan di dalamnya, kekuasaan individu untuk 'bertindak dengan cara ini'. Menurutnya, adalah *analitis* bahwa orang (agen) seharusnya mampu untuk bertindak dengan cara yang berbeda.

Giddens dalam teorinya mengenai agen dan struktur, menjelaskan hubungan keduanya. Seseorang (agen) bertindak dipengaruhi oleh apa, adakah norma-norma yang mempengaruhi agen? Mengapa ada pola keseluruhan dalam tindakan-tindakan mereka, sebab ada pola keseluruhan dalam norma-norma. Polanya, menurut Giddens adalah pola sistem sosial atau struktur masyarakat yang dipersoalkan dan dengan mengacu pada sistem atau struktur itu, tempat aturan dan norma ditata mengelilingi status-status untuk membentuk lembaga-lembaga sosial, tindakan dapat dimengerti dan dijelaskan (Ritzer & Smart, 2015: 689). Jadi, agen menurut Giddens digambarkan sebagai objek dalam realitas sosial.

Giddens mengacu pada bahasa untuk menyampaikan pemikirannya mengenai aturan. Manusia mengambil sumber daya bahasa dengan segala macam cara untuk segala jenis tujuan. Bahasa tidak memberitahukan manusia apa yang boleh atau tidak boleh dikatakan. Manusia menggunakan bahasa dengan sekehendak hatinya. Dan

dalam mempergunakan bahasa sesuai kehendaknya, bagaimanapun caranya, manusia menyusun ulang bahasa sebagai sejumlah sumber daya yang siap untuk digunakan. Begitu pula, sejumlah aturan dapat bertahan sebagai sesuatu yang digunakan. Begitu pula, sejumlah aturan dapat bertahan sebagai sesuatu yang digunakan di dalam dan oleh sebuah kolektif, yang disebut Giddens sebagai struktur sosial.

Sebuah struktur sosial yang memudahkan sekaligus membatasi tindakan yang memanfaatkannya sama dengan struktur sosial memudahkan tindakan berdasarkan apa yang bisa disediakan dan membatasi tindakan berdasarkan apa yang tidak dimiliki dan tidak dapat disediakan. Namun, struktur sosial tidak berfungsi sebagai penentu atau bahkan sebagai sebab bagi tindakan itu, sebab struktur sosial tidak ‘membuat’ agen-agen aktif yang membuat struktur tersebut cenderung melakukan sesuatu hal daripada hal lainnya (Ritzer & Smart, 2015: 692). Agen-agen sendirilah yang memutuskan tindakan apapun. Mereka yang memutuskan untuk memanfaatkan struktur atau tidak. Sehingga mewujudkan “keagenan” mereka yang menyusun ulang struktur lewat tindakan mereka dan menjamin keberadaan struktur terus berlanjut.

Namun, dalam perkembangannya teori strukturasi Giddens ini mendapatkan beberapa kritik yang mendasar mengenai tidak terjawabnya pertanyaan tentang “siapakah yang lebih mempengaruhi, lingkungankah atau agenkah? Apakah lingkungan mempengaruhi agen? Atau agen yang mempengaruhi lingkungan?. Kemudian Little John dan Foss juga mengkritik bahwa teori Giddens ini terlalu elektik dengan teori yang abstrak sehingga cenderung tidak relevan dalam riset. Lebih dari itu, Giddens

dianggap terlalu fokus hanya menjelaskan relasi agen dan struktur yang kurang memperhatikan media, atmosfer politik, budaya, dan hal lain secara mendalam.

2.2.2. Agen - Struktur *Pierre Bourdieu* (1930 – 2003)

Bourdieu mengatasi apa yang dianggapnya sebagai pertentangan “yang keliru” antara objektivisme dan subjektivisme atau pertentangan yang tidak masuk akal antara individu dan masyarakat (Wirawan, 2012: 272). Realitas sosial yang mendasari teori sosial Bourdieu adalah dunia empirik (dunia sosial). Bourdieu berpendapat bahwa mempertentangkan antara agen dan struktur itu sudah menjadi konsep yang usang. Menurutnya, struktur juga terdapat dalam dunia sosial. Ia berasumsi bahwa struktur objektif merupakan hal yang independen dari kesadaran dan kehendak agensi yang mampu membimbing dan membatasi praktik dan representasinya (Bourdieu, 2016).

Bourdieu menentang aliran strukturalisme Saussure, Levi Strauss dan strukturalisme Marxis. Aliran atau perspektif ini dikritik karena berfokus pada struktur-struktur objektif dan mengabaikan proses konstruksi sosial melalui proses memahami, memikirkan dan mengkonstruksi struktur-struktur. Kaum objektivisme mengabaikan agensi (subjek), sedangkan Bourdieu lebih menyukai posisi yang strukturalis tanpa mengabaikan agensi (Jenskin, 2016:3).

Bourdieu mengadopsi pemikiran konstruktifis untuk menguraikan asal usul skema persepsi, pemikiran dan tindakan serta struktur-struktur sosial. Ia meramu menjadi suatu pemikiran baru yang ia sebut dengan metode strukturalisme-konstruktif. Melalui metode ini, Bourdieu menyintesis antara teori yang terlalu menekankan

struktur dan objektivitas dengan teori yang menekankan peran aktor dan subjektivitas (Lubis dalam Siregar, 2016: 84). Dalam penjelasannya tentang struktur-agen, Bourdieu memberi solusi untuk tidak mempertentangkan keduanya. Sehingga dilema tentang agen-struktur, objektivisme-subjektivisme selesai, dengan memunculkan praktik yang merupakan hubungan dialektika antara struktur dan agen.

Bourdieu menawarkan pentingnya habitus dan bidang, serta hubungan dialektikanya satu dan lainnya. Ia menolak pembagian antara individualistis metodologi dan menganut pendapat yang baru dengan istilah “*relasionisme metodologis*”. Habitus terdapat dalam pikiran aktor yang ia sebut sebagai agen sedangkan arena/ ranah (*field*) terdapat di luar pikirannya.

Kontribusi besar dari teori Bourdieu dalam menganalisis masyarakat, termasuk di dalamnya sistem sosial seperti yang ditulis Ritzer dan Goodman (2007) adalah, pemakaian konsep habitus yang dianggap berhasil mengatasi masalah dikotomi individu-masyarakat, agen-struktur sosial dan kebebasan-determinisme. Selain itu, Bourdieu juga membongkar mekanismenya dan strategi dominasi. Dominasi tidak lagi diamati dari akibat-akibat luar, tetapi juga akibat yang dibatinkan (habitus). Dengan menyingkap mekanisme tersebut kepada para pelaku sosial. Demikian, teori kritis Bourdieu terhadap realitas sosial selain habitus, arena, modal, juga *distinction* dan dominasi simbolik, dituliskan di bawah ini.

a. Habitus

Bourdieu telah memberi perhatian pada hal-hal yang dilakukan individu (agen) dalam kehidupan sehari-hari mereka. Cara utama ini, adalah melalui apa yang disebut Bourdieu sebagai “habitus” atau norma disosialisasikan atau kecenderungan bahwa perilaku panduan dan berfikir. Habitus adalah satu kata bahasa latin yang mengacu kepada kenampakan atau situasi yang tipikal atau habitual, khususnya pada tubuh (Jenkins, 2016: 107).

Habitus adalah struktur sosial yang terinternalisasi dan termanifestasi. Habitus itu struktur mental, atau kognitif yang digunakan aktor dalam menghadapi kehidupan sosial (Ritzer & Goodman, 2007: 522). Kebiasaan, skema atau pola yang terintegrasi dalam kehidupan agen yang dimanfaatkan untuk merasakan, memahami, mengerti, menyadari dan menilai dunia sosial. Individu itu, sesungguhnya bukanlah agen yang sepenuhnya bebas dan bukan produk pasif dari struktur sosial. Menurut Bourdieu, habitus adalah sebuah sistem dimana hadir karena kombinasi struktur objektif dan sejarah personal, disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah yang melaksanakan fungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara objektif (Siregar, 2016: 85). Realitas sosial tersebut, memperlihatkan terjadinya pembagian objektif pada struktur kelas, kelompok umur, gender dan kelas sosial. Bourdieu juga berpandangan bahwa kekuasaan dalam konteks teoritik dalam masyarakat, dimana ia memperlihatkan adanya kekuasaan sebagai budaya dan simbolis, dan yang secara terus menerus kembali dilegitimasi kembali melalui agen dan struktur.

Realitas sosial tentang habitus adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan oleh orang untuk berelasi dengan dunia sosial (Bourdieu, 1989: 18). Habitus dirumuskan melalui proses sosial, bukan individu yang mengarah ke pola permanen dan kemudian di transfer dari satu konteks tertentu dari waktu ke waktu. Habitus, sesungguhnya didapat sebagai akhir dari pendudukan jangka panjang di suatu posisi dunia sosial. Oleh karena itu, habitus itu bervariasi dan tergantung pada sifat, kedudukan individu di dunia/ arena tersebut; tidak semua orang memiliki habitus yang sama. Jadi, habitus itu tidak tetap atau tidak permanen dan dapat berubah di bawah situasi yang tidak terduga. Habitus agen terbentuk mulai proses dialektika. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa habitus akan muncul dan tumbuh dalam masyarakat secara alamiah dengan cara masuk sebagai proses sosial yang sangat panjang, ia terinternalisasi dan terakulturasi pada masyarakat yang kemudian menjadi kebiasaan yang terstruktur dengan sendiri.

Bourdieu melalui karyanya, dituntun oleh “keinginan untuk memperkenalkan kembali gaya praktik agen, yaitu kemampuannya untuk berimprovisasi” (Wirawan, 2012: 272). Demikian juga, habitus memberi peluang individu untuk memahami dunia sosial, tetapi keberadaannya di dunia sosial dan struktur-strukturnya tidak menentukan keseragaman semua aktor. Akan tetapi, mereka yang berada pada posisi yang sama dalam dunia sosial cenderung memiliki habitus yang sama. Dengan pengertian ini, habitus dapat juga berupa fenomena kolektif. Habitus memungkinkan orang untuk memahami dunia sosial, tetapi keberadaan habitus dalam jumlah banyak berarti bahwa

dunia sosial dan struktur-strukturnya tidak menentukan sendiri secara beragam pada semua aktor.

Habitus; menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Disatu pihak, habitus merupakan “struktur yang menyusun” dunia sosial dan di pihak lain ia adalah struktur yang tersusun oleh dunia sosial yang disebut oleh Bourdieu sebagai dialektika internalisasi atas eksternalisasi dan eksternalisasi atas internalitas.

“The habitus is not only a structuring structure, which organizes practices and the perception of practices, but also a structured structure: the principle of division into logical classes which organizes the perception of the social world is itself the products of internalization of the division into social classes” (Bourdieu, 1984:170).

Artinya, habitus adalah struktur-struktur yang menstrukturkan yakni dapat melahirkan praktik-praktik yang tepat, sesuai dengan situasi khusus dan tertentu (Bourdieu, 2016: xvii). Dengan demikian, habitus memungkinkan Bourdieu menghindari dan memiliki antara subjektivisme dan objektivisme. Menghindari dari sifat filsafat subyektif tanpa menghilangkan agen serta dari filsafat struktur tanpa melupakan untuk memperhitungkan pengaruh yang dimiliki struktur terhadap dan atau melalui agen (Bourdieu dalam Wirawan, 2012: 276).

Meski habitus adalah struktur terinternalisasi yang membatasi “pikiran” dan pilihan “tindakan”, habitus tidak menentukan pikiran dan pilihan tindakan tersebut. Tidak adanya determinisme tersebut, merupakan salah satu hal penting yang membedakan posisi Bourdieu, dari posisi strukturalis arus utama. Habitus sekedar menyarankan apa yang seharusnya dipikirkan orang dan apa yang seharusnya mereka pilih untuk dilakukan. Habitus merupakan kebiasaan masyarakat yang melekat dalam diri individu yang berbentuk disposisi abadi, kapasitas terlatih dan adanya

kecenderungan terstruktur ketika berfikir, merasa dan bertindak dengan cara determinan. Disposisi inilah yang kemudian membimbing mereka.

Bourdieu mempertahankan relasi antara tubuh dengan habitus, dimana terdapat disposisi dan skema klasifikatori generatif sebagai esensi dari habitus yang tersimbolkan kedalam hakikat manusia seutuhnya. Perwujudan ini, memiliki tiga makna dalam karyanya; *Kesatu*, dalam nalar yang sepele, habitus hanya ada selama ia ada “di dalam kepala” aktor (dan kepala adalah bagian dari tubuh agen). *Kedua*, habitus terdapat di dalam, melalui dan disebabkan oleh praksis aktor dan interaksi antara mereka dan dengan lingkungan yang melingkupinya yakni cara mereka berbicara, cara mereka beraktifitas, dan cara melakukan sesuatu. *Ketiga*, “taksonomi praktis” habitus berada pada tubuh manusia, yang bisa diakses pancaindra –ketika menalarkan dan berakar dalam pengalaman sensoris—dari cara pandang individu yang disimbolkan. Karena sudah menjadi kebiasaan, maka hal yang dilakukan kemudian menjadi suatu disposisi yang terstruktur, dan menjadi kesadaran serta sikap yang tertanam dalam diri. Kemudian, kebiasaan ini menjalankan fungsi sebagai *frame* yang melahirkan serta memberi bentuk kepada persepsi (struktur kognitif), presentasi dan perilaku atau tindakan seseorang karena telah ditumbuh kembangkan. Sedangkan perilaku lain yang terkait dengan kebiasaan itu akan dikerangkai oleh atau disesuaikan hal tersebut. Ia akan terpola, teratur, spontan dan dapat saja tanpa disadari itu akan menghasilkan pada tujuan dan hasil tindakan tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi tentang habitus, disposisi-disposisi yang direpresentasikan/ diperlihatkan oleh habitus, bersifat;

- 1) Bertahan lama yakni bertahan disepanjang rentang waktu tertentu dari kehidupan seorang agen.
- 2) Bisa dialihpindahkan dalam arti sanggup melahirkan praktik-praktik di berbagai arena aktivitas yang beragam.
- 3) Merupakan struktur yang distrukturkan, yakni mengikutsertakan kondisi-kondisi sosial objektif pembentukannya.
- 4) Merupakan struktur-struktur yang menstrukturkan, yakni mampu melahirkan praktik-praktik yang sesuai dengan situasi-situasi khusus dan tertentu (Bourdieu, 2016: xvi).

Dalam penjelasan mengenai habitus, Bourdieu dalam tulisan lainnya juga menggunakan istilah *hexis* yang merupakan bahasa Yunani yang maknanya tidak berbeda dengan habitus. Kata ini dipakai untuk menjelaskan sikap, cara dan gaya dimana aktor “membawakan dirinya sendiri”: sikap, bahasa tubuh, cara berjalan, dan lain-lainnya (Jenkins, 2016: 108). Lebih lanjut, *hexis* ragawi, merupakan mitologi politis yang disadari, disimbolkan, yang beralih pada disposisi permanen, satu cara berdiri, berbicara dan perasaan dan pemikiran yang berlangsung terus menerus.

Dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami, Ritzer menyebut bahwa habitus merupakan struktur mental atau kognitif yang digunakan oleh agen untuk menghadapi kehidupan sosialnya. Para agen ini dibekali dengan serangkaian skema atau pola yang diinternalisasikan yang digunakan untuk merasakan, memahami, menyadari dan menilai dunia sosial. Dari pola-pola inilah kemudian para aktor memproduksi tindakan mereka dan juga menilainya (Ritzer dan Goodman: 2004).

Demikian gambaran habitus yang secara garis besar dijelaskan oleh Bourdieu, dimana penajaman darinya adalah habitus sebagai proses dimana agensi tidak menerima secara mentah struktur. Agensi yang menginternalisasi struktur, tetap saja memiliki ruang-ruang refleksi atas pilihan-pilihan rasional mereka, prinsip-prinsip, strategi-strateginya sebagai saringan sebelum agensi mengimprovisasinya (Krisdinanto, 2014).

b. Arena/ Ranah (*Field*)

Habitus berkenaan dengan *field*, karena praktik-praktik atau tindakan agen merupakan habitus yang dibentuk oleh *field* (Chyun, 2001). *Field*, menurut konsep Bourdieu adalah medan, arena atau ranah sebagai ruang sebagai tempat agen/aktor saling bersaing untuk memperoleh sumber-sumber daya material atau kekuatan (*power*) simbolis.

Agen-agen menurut Bourdieu, tidak bertindak dalam ruang hampa, namun mereka berada pada situasi sosial yang nyata yang diatur seperangkat relasi-relasi sosial yang objektif. Supaya dapat memahami situasi, atau sebuah konteks tanpa kembali jatuh dalam determinisme analisis objektivistik, maka Bourdieu mengembangkan konsep arena (Bourdieu, 2016: xvi)

Arena atau field merupakan suatu jaringan hubungan di antara posisi objektif (Bourdieu dalam Wirawan, 2012: 276). Lebih dimaknai secara rasional daripada secara struktural. Arena terpisah dari kehendak individu. Mereka bukan interaksi atau ikatan antarsubjektif di antara individu. Arena-arena dijelaskan sebagai ruang yang terstruktur

dengan kaidah keberfungsian sendiri, dengan relasi kekuasaannya sendiri yang terlepas dari berbagai kaidah seperti politik, ekonomi, kecuali ketika berada pada kasus arena ekonomi dan arena politik itu sendiri. Meskipun setiap arena relatif otonom, tapi secara struktural sebenarnya mereka tetap homolog satu dan lainnya. Strukturnya, dimomen apapun, dipastikan oleh hubungan diantara posisi-posisi yang ditempati agen atau individu di arena itu. Arena adalah suatu konsep dinamis, di mana perubahan posisi-posisi agen mau tidak mau menyebabkan perubahan struktur arena (Bourdieu, 2016: xviii).

Bourdieu menganggap bidang atau arena sesuai dengan definisi sebagai arena pertempuran. Bidang kekuasaan (politik)-lah yang menurutnya paling penting, hierarki hubungan kekuasaan dalam bidang politik berfungsi untuk menyusun semua bidang lainnya. Arena menurut Bourdieu dipandang secara relasional daripada struktural (Ritzer & Goodman, 2010: 582-590). Sebuah arena sosial sebagai tempat perjuangan atau manuver untuk perebutan sumber atau pertarungan dari keterbatasan akses. Arena juga didefinisikan sebagai taruhan yang diperebutkan, misalnya; keberadaan benda kultural (gaya hidup), kemajuan intelektual (pendidikan), pekerjaan yang layak, pemukiman, tanah, kekuasaan (politik), kelas sosial, prestise atau lainnya-- dan mungkin berada pada tingkatan yang berbeda dengan spesifikasi dan derajat kekonkretan (Jenkins, 2016: 124).

Arena adalah suatu sistem posisi sosial yang terstruktur --yang dikuasai oleh individu atau institusi-- suatu inti yang mendefinisikan situasi untuk mereka anut (Jenkins, 2016: 125). Demikian, arena/ ranah dan habitus berhubungan satu dengan

yang lainnya. Keduanya saling menentukan satu sama lain. Habitus terbentuk, berfungsi dan sah dalam sebuah lingkungan (ranah) dalam hubungannya dengan suatu lingkungan. Habitus merupakan lingkungan dari kekuatan yang ada, sebuah situasi yang dinamis, dimana kekuatan akan terwujud dalam hubungan dengan kecenderungan tertentu.

Arena juga menjadi suatu sistem kekuatan yang ada di antara posisi tersebut; suatu arena yang distrukturkan secara internal dalam konteks relasi kekuasaan. Posisinya ada dalam relasi dengan dominasi, subordinasi atau ekuivalensi (homologi) satu sama lainnya karena akses yang dapat mereka raih atas benda atau sumber (modal) yang dipertaruhkan di arena. Benda-benda tersebut, secara prinsipil dapat dibedakan menjadi empat kategori; modal ekonomi, modal sosial (berbagai jenis relasi bernilai dengan pihak lain yang bermakna), modal kultural (pengetahuan sah satu sama lain) dan modal simbolis (prestise dan gengsi sosial). Intinya, eksistensi dari suatu arena menjelaskan, dalam fungsinya, serta menciptakan suatu kepercayaan dalam sisi partisipan pada legitimasi dan nilai modal yang dipertaruhkan di arena. Kepentingan yang sah dalam arena ini diproduksi oleh proses historis yang sama yang memproduksi arena itu sendiri, demikian Bourdieu menjelaskan seperti yang ditulis oleh (Jenkins, 2016: 125).

Arena juga sering dimaknai sebagai lingkungan yakni jaringan relasi antar posisi objektif di dalamnya. Di situ menurut Bourdieu, adalah tempat pertarungan, lingkungan perjuangan, tempat adu kekuatan, sebuah medan dominasi dan tempat terjadinya konflik setiap kelompok demi mendapatkan posisinya, yang kadang ditentukan oleh

modal yang dimiliki. Arena atau lingkungan dapat dianalisis melalui tiga langkah dalam proses menurut Ritzer dan Goodman, yakni; pertama, dengan mendeskripsikan keutamaan dalam lingkungan kekuasaan (politik) untuk menemukan relasi setiap lingkungan yang khusus dengan lingkungan politik. hubungan arena dengan “arena politik” harus dipahami. *Kedua*, menjelaskan struktur objektif hubungan antar berbagai posisi dalam lingkungan tertentu dan yang ketiga adalah menentukan ciri-ciri kebiasaan agen-agen yang menghuni berbagai tipe posisi dalam lingkungan (2003: 524).

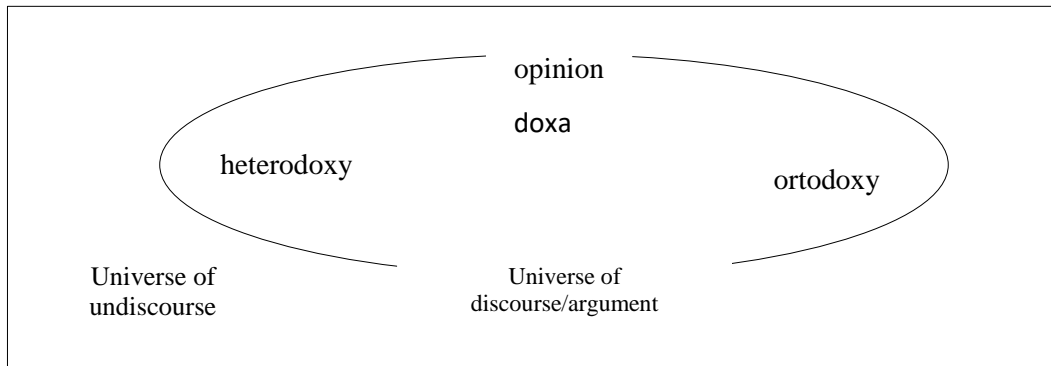
Model masyarakat yang oleh Bourdieu dikatakan sebagai ruang sosial, adalah sesuatu yang terdiri dari arena yang berkaitan dan penting untuk memahami kolektivitas sosial, khususnya kelas sosial. Kelas dalam hal ini dipahami dengan cara pandang objektivis yaitu kategori orang yang menempati posisi di dalam suatu arena. Semakin dekat posisi masing-masing arena, semakin mirip partisipasi penganut mereka dalam habitus yang dimiliki bersama-sama yakni kemungkinan pembentukan mereka sebagai kelompok sosial melalui perjuangan politik dan pengakuan kolektif atas identitas mereka secara berbeda dari kelompok atau kelas lainnya.

Arena menurut Bourdieu adalah *field of struggle*, dimana para agen (aktor) memperjuangkan peningkatan posisi objektif mereka (Bourdieu dan Wacquant, 1992). Arena merupakan kelompok yang terorganisasi diseperti kepentingan yang serupa, mereka yang bersaing berebut sumberdaya material tertentu dengan perilaku-perilaku yang terorganisasikan di sekitar kompetisi itu. Arena, dikonstruksi secara subjektif oleh para peneliti, menurut pemahamannya mengenai para aktor, demikian menurut Dobbin (Munandar, 2011: 34). Karena dalam arena/ tempat pertarungan, para aktor akan

menerapkan berbagai strategi, yaitu *the active deployment of objectively oriented "line of action" that obey regulaties and form coherentand socially intelligible patterns"*. Namun, pilihan strategi yang ada bagi aktor, biasanya terbatas oleh posisi objektif mereka dalam arena, yang ditentukan oleh distribusi modal tertentu dan cara pandang mereka terhadap arena itu sendiri (Bourdieu dan Wacquant, 1992: 25).

Arena, di dalamnya selalu ada dua kekuatan yang kontradiktif menurut Kauppi (2003) dalam Munandar (2011 :35), yakni kelompok progresif, yakni mereka yang menginginkan perubahan dan dan kelompok konservatif, bagian dari masyarakat yang ingin menjaga tatanan, penantang (*challenger*) dan pemegang jabatan (*incumbent*), *ortodoxy* dan *heterodoxy*, dimana kontradiksi ini kuat mengakar pada perbedaan habitus para aktor. Pemikiran Kauppi ini, diidentifikasi oleh Munandar berakar pada konsepsi Bourdieu tentang semesta dari yang tidak diperdebatkan (*universe of undiscouse/undisputed*), atau *doxa*, dan semesta diskursus (*universe of discourse*) yang terdiri atas *orthodoxy* dan *heterodoxy*. *Doxa* lebih dari wacana dominan, yakni wacana yang bersifat mutlak benar, tidak pernah bisa diganggu gugat dan tidak mungkin didiskusikan. Sedangkan bagian lain dari semesta wacana di luar *doxa* yaitu ranah opini yang berisi pergulatan antara *ortodoxy* (yaitu opini yang bertujuan untuk memperkuat atau mengembalikan posisi prima dari kebenaran mutlak *doxa*) dan *heterodoxy* (opini yang bertujuan menggugat keabsahan *doxa*). Dalam suatu proses dialektif yang memunculkan ranah opini ini, kemudian terjadi krisis yang "merusak" kesesuaian yang sebelumnya telah ada antara subjektif agen (*habitus*) dengan struktur

objektif arena. Pertarungan simbolik tersebut, telah mencapai klimaks ketika *heterodoxy* menjadi *doxa* yang baru, sehingga *orthodoxy* kini menjadi *heterodoxy*.



Skema 1. *Doxa, Orthodoxy, Heterodoxy* (sumber: Munandar, 2011:35)

c. Modal (*Capital*)

Selain mengenai habitus dan arena, pemikiran Bourdieu kemudian berfokus mengenai modal atau kapital. Modal adalah suatu konsentrasi kekuatan spesifik yang beroperasi pada arena/ ranah. Setiap arena mendorong individu untuk mempunyai modal khusus supaya bisa hidup dengan proposionl dan bertahan di dalamnya. Modal menjadi hal yang penting dalam pertarungan sosial. Modal memiliki peran yang cukup penting dalam hubungan kekuatan sosial, demikian modal menyuguhkan sarana dalam wujud non-ekonomi dominasi. Para pemilik modal dan habitus yang sama akan lebih mampu melakukan tindakan mempertahankan atau mengubah struktur dibandingkan mereka yang tidak memiliki modal. Modal dapat diperoleh jika seseorang memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya.

Modal sebagai aset yang dimiliki individu, digunakan sebagai penentu posisi dalam suatu ranah. Terdapat empat macam modal menurut Boudieu yakni modal sosial, modal kultural atau budaya dan modal simbolik. Modal sosial adalah hubungan sosial

yang dianggap bernilai antara masing-masing individu atau jaring hubungan yang menjadi sumber daya yang berguna dalam penentuan serta reproduksi kedudukan sosial. Modal ekonomi adalah segala bentuk modal yang dimiliki yang berupa materi. Modal kultural, adalah berbagai pengetahuan yang sah serta modal simbolik yang biasanya bersumber dari kehormatan dan prestige seseorang (Ritzer & Goodman, 2003: 524). Modal simbolik sendiri, mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan dan dibangun di atas dialektika pengetahuan dan pengenalan. Modal simbolik ini bisa berupa status karena ekonomi, gelar pendidikan di kartu nama, dan sebagainya (Haryatmoko: 2003).

Modal, akan eksis dan berfungsi dalam arena, karena modal mempunyai kekuatan terhadap arena. Modal sangat menentukan produksi dan reproduksi instrumen yang terkandung dalam arena, dan distribusinya membentuk struktur arena itu sendiri. Tapi, modal juga memiliki kekuatan terhadap pola-pola dan keteraturan yang mengatur kinerja arena, sehingga modal ini akan menentukan keuntungan apa saja yang bisa diperoleh para agen dalam arena (Bourdieu dalam Munandar, 2011: 36).

Kauppi (2003) mengidentifikasi peran sentral dua jenis modal politik dalam arena politik, yakni; modal politik personal dan modal politik institusional. Modal politik personal adalah modal yang melekat pada diri individu misalnya kharisma. Modal politik institusional merupakan hasil investasi sebuah institusi politik, yang kemudian sebagian dialihkan kepada para anggotanya dalam bentuk jabatan/posisi. Jadi, kekuasaan seorang agen akan ditentukan oleh kekuasaan yang melekat pada institusi politiknya dan posisinya di dalam institusi tersebut.

d. Dominasi Simbolik

Bourdieu bersama Passeron, membangun teori dominasi simbolik dengan berusaha untuk lebih spesifik dalam konteks teoritis proses mekanisme budaya yang memproduksi secara tidak langsung aturan, kendala sosial ketimbang dengan suatu kontrol sosial yang langsung dan koersif. Dalam menjelaskan gagasannya, mereka berdua mengambil ide Weber, terutama pembahasannya tentang otoritas dan dominasi yang sah (Jenskin, 2016:156).

Dominasi simbolik sering diterjemahkan sebagai kekerasan kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar (*unconscious*) yang berlaku pada kelompok tertentu dalam kehidupan masyarakat, meliputi tindakan diskriminatif terhadap kelompok/ ras/ suku/ gender tertentu. Penggunaan kata kekerasan simbolik (*symbolic violence*), kuasa simbolik (*symbolic power*) dan dominasi simbolik (*symbolic dominance*), didefinisikan Bourdieu untuk menyebut hal yang sama. Kemudian Bourdieu juga menyebut pengertian ketiganya sebagai suatu kuasa untuk menentukan instrumen-instrumen pengetahuan dan ekspresi kenyataan sosial secara semena (namun tidak disadari) (Bourdieu, 1995: 168). Dalam pengertian tersebut, kuasa simbolik disebut sebagai kuasa untuk mengubah dan menciptakan kenyataan yakni mengubah dan menciptakannya untuk diakui dan dikenali secara sah dan legitimate.

Bourdieu (1989) menjelaskan bahwa *symbolic power* sebagai *the power to make groups*, dimana kekuasaan untuk mempertahankan serta merubah prinsip-prinsip objektif dari pemisahan atau penyatuan, diasosiasi atau asosiasi, kekuasaan dalam

mempertahankan atau mengubah berbagai klasifikasi, kekuasaan untuk mendiskripsikan individu, beberapa kelompok atau lembaga/ institusi, misalnya dengan melalui kata-kata serta kekuasaan untuk mendefinisikan situasi dimana interaksi tersebut berlangsung. Tapi, kenyataannya kemampuan konstitutif *symbolic power* juga ditentukan oleh modal simbolik (*symbolic capital*) yang biasanya diperoleh oleh seorang agen pada pertarungan simbolik yang terjadi sebelumnya, dan kesesuaian apa yang dinyatakan dengan realita (Munandar, 2011:35).

Dominasi simbolis, bagi Bourdieu merupakan pemaksaan dari sistem simbolisme dan makna (misalnya kebudayaan), kepada kelompok atau kelas, sehingga hal tersebut dialami dan dianggap seperti sesuatu yang sah. Dominasi atau kuasa simbolik sering kali oleh beberapa literatur juga disebut sebagai dominasi simbolik, berkaitan dengan modal simbolik. Kuasa simbolik Bourdieu, akan terwujud dalam arena, dari relasi-relasi dialektiknya dengan habitus dan modal (kapital), terutama kapital simbolik. Seseorang yang menguasai kapital dengan habitus yang memadai akan menguasai arena, serta akan memenangkan pertarungan sosial karena pada arena selalu saja terjadi pertarungan sosial.

Modal simbolik, dipersepsikan dan diakui sebagai suatu yang legitimate (memiliki legitimasi) dalam bentuknya yang berbeda, karena memiliki legitimasi, mendapat pengakuan dan diterima oleh masyarakat luas. Dominasi simbolik sering dimaknai sebagai dominasi yang diperoleh secara paksa mempunyai kepatuhan yang tidak dapat disarankan yang oleh publik tidak dirasakan sebagai paksaan karena dianggap terdapat harapan-harapan kolektif dari kepercayaan yang sudah tertanam

secara sosial. Inilah alasan mengapa kelompok yang terdominasi sering merasa tidak keberatan dengan dominasi. Dominasi simbolik, bagi Bourdieu merupakan pemaksaan sistem simbolisme dan berarti bagi kelompok atau kelas sedemikian rupa sehingga hal tersebut dialami sebagai sesuatu yang sah (Jenkins, 2016: 157). Selain itu, dominasi simbolik biasanya memiliki kemampuan oleh pelakunya supaya tidak bisa dikenali bentuk aslinya, kesewenangannya, dominasinya karena kekuasaan simbolik selalu memakai bentuk-bentuk lain yang lebih halus agar tidak mudah dikenali.

Legitimasi dominasi simbolis meneguhkan relasi antar kekuasaan yang menimbulkan pemaksaan tersebut berhasil. Selama ia diterima sebagai suatu hal yang sah, sebuah budaya memperkuat dirinya melalui relasi kekuasaan tersebut, berkontribusi kepada reproduksi sistematis mereka. Ini diraih melalui suatu proses salah mengenali (*misrecognition*); yakni suatu proses dimana relasi kekuasaan tidak dipresepsikan secara objektif, namun dalam bentuk yang menjadikan mereka absah di mata pemeluknya (Jenkins, 2016: 157).

e. Distinction (Pembeda)

Bourdieu dalam karyanya “*Distinction: a social critique of the judgement of taste*”, berpendapat bahwa penilaian-penilaian selera, akan selalu berhubungan dengan suatu posisi sosial. Ia mengartikan *distinction* sebagai usaha dari kelompok individu pada suatu ruang sosial, masing-masing berguna dalam mengembangkan kekhasan budaya yang dapat menandai mereka keluar satu sama lainnya.

Bagi Bourdieu, konsep pembedaan (*distinction*) bermakna sebagai tindakan membedakan diri oleh seseorang, untuk memperlihatkan kelasnya dalam masyarakat. Distingsi atau pembedaan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat kelas menengah ekonomi ke atas, supaya mereka dapat menunjukkan statusnya yang khas dibandingkan dengan kelas yang lainnya, yakni kelas ekonomi yang lebih rendah.

Orang mengejar kehormatan/pembeda (*distinction*) dalam berbagai lingkungan kultural dalam beberapa produk, gaya hidup yang berbeda dengan orang lainnya. Menurut Bourdieu, ranah (lingkungan) menawarkan peluang untuk mengejar kehormatan hampir tidak ada habisnya. Barang-barang kultural tertentu akan menghasilkan keuntungan tinggi, sedangkan yang lainnya tidak menguntungkan bahkan menimbulkan kerugian (Ritzer & Goodman, 2007: 529). Dari sudut pandang yang berbeda, *distinction* ini bisa menjadi fokus perjuangan simbolik (perjuangan untuk pembedaan) dimana anggota sebuah kelompok berusaha untuk membangun keunggulan dari pembedaan itu sendiri, perjuangan simbolis terjadi sebagai aspek perjuangan kelas.

Seperti halnya pengetahuan selalu mengalami perkembangan, teori Bourdieu juga mendapat kritik dalam dunia ilmu sosial, disamping kelebihan yang ada didalamnya dan ini diakui oleh banyak pihak.

Penjelasan teori Bourdieu mengenai habitus, arena dan modal yang olehnya disebut teori praktik, lebih jelas memperlihatkan bagaimana yang ia sebut sebagai agen dan struktur, *linkage* antara keduanya antara objektifisme dan subjektifisme. Konsep tentang kekerasan simbolik dan *distinction* (pembeda) juga memberi penjelasan relasi-

relasi yang terjadi antara keduanya. Teori yang disajikan oleh Bourdieu menjawab pertanyaan para kritikus terhadap teori strukturasi Giddens mengenai “siapa yang mempengaruhi kepada siapa?”. Menurut Bourdieu, agen dan struktur saling mempengaruhi.

Sebagai seorang filsuf yang mempunyai berbagai minat kajian yang luas, seperti sastra, bahasa, sosiologi, psikologi, politik dan bahkan ekonomi (Karnanta, 2013:3), memberi batasan padanya tentang jabaran contoh mengenai implikasi teorinya. Dalam beberapa literatur, buku, kutipan pendapatnya, ia memberi contoh dalam kajian pendidikan dan kajian sastra-bahasa. Misalnya analognya tentang arena yang ia katakan;

“arena adalah tempat bagi pergulatan-pergulatan, dimana yang dipertaruhkan yakni kekuasaan untuk mengimpikan posisi/ memaksakan definisi dominan tentang penulis...taruhan utama dalam pergulatan sastra adalah monopoli legitimasi sastra (Bourdieu, 2010:22)”

Luasnya definisi yang disampaikan Bourdieu ini, membuat teori ini kemudian dikritik; seolah sangat luas, tanpa batasan-batasan. Misalnya klaim terhadap apa yang dimaksud arena, tentu saja tidak akan sama arena dalam dunia sastra dan dunia politik. Demikian dalam dunia ekonomi maupun pendidikan, dan sebagainya. Namun demikian, sampai saat ini teori Bourdieu eksis dalam ilmu sosial, dimanfaatkan untuk menjelaskan fenomena praktik. Satu hal yang menjadi kekuatan Bourdieu adalah keyakinannya melihat agensi. Walaupun ia bukan orang pertama yang menjelaskan konsep agen, tapi perbedaan yang jelas tentang agensi menurut konsep sebelumnya, ia tegaskan. Sebelumnya (Giddens) melihat agen adalah individu yang menjadi subjek sosial. Sedangkan Bourdieu menjelaskan bahwa setiap individu dilengkapi dengan

kemampuan untuk memahami, mengontrol tindakan masing-masing menurut situasi dan kondisi tempat hidup individu. Jadi, menurutnya agen itu individunya dan agensi adalah kemampuan individu tersebut dalam berelasi terhadap struktur sosialnya. Agen mempunyai struktur subjektif yang terkait dengan habitusnya, yang menghasilkan praktik, gaya hidup sesuai dengan pengalaman dan proses internalisasi agen dalam berinteraksi dengan agen lainnya atau dengan struktur objektif tempat ia tinggal bereksistensi. Ini menjelaskan secara tegas tentang agen.

Kelebihan lain yang ada pada Bourdieu adalah konsepnya mengenai modal. Berbeda dengan teori modal dari ahli lain, Bourdieu menjelaskan bahwa modal sesungguhnya tidak hanya berupa modal ekonomi saja, namun juga berupa modal simbolik, modal sosial dan budaya seperti yang dijelaskan di atas. Namun tetap saja, Bourdieu mengakui bahwa modal ekonomi adalah modal yang relatif paling bebas, fleksibel disebabkan modal ini yang paling mudah digunakan atau ditransformasikan ke dalam ranah-ranah lainnya, selain itu modal ini paling mudah diwariskan kepada orang lain. Penjelasan Bourdieu yang masih terlalu luas menjelaskan tentang keberadaan modal dalam praktik sosial, memerlukan pendalaman yang tajam ketika konsep ini dimanfaatkan untuk mengkaji modal perempuan dalam arena rekrutmen legislatif di Jawa Tengah.

Konsepsi Bourdieu tentang ranah menuai kritik, ketika ia mendefinisikan konsep ranah sebagai pergulatan dan perjuangan yang ia anggap sebagai “dunia kehidupan”. Ini kemudian seolah klaim bahwa relasi sosial hanya terdiri atas pertarungan memperebutkan posisi-posisi belaka. Padahal tentu saja tidak hanya demikian, dalam

ranah atau arena terdapat bentuk relasi yang juga penting, seperti persahabatan, solidaritas, ketaatan, dan sebagainya.

Kritik berikutnya muncul kepada Bourdieu terkait dengan gaya bahasa Bourdieu yang rumit. Ia cenderung menggunakan kalimat yang panjang, rumit, berlebihan dan beranak pinak, sehingga terkesan selalu mengulang-ulang gagasannya yang sama dengan istilah-istilah teknis dengan konsep yang rumit gaya bahasanya.

Walaupun beberapa kritik terlontarkan terhadap pemikiran Bourdieu, namun dalam penelitian ini teori Bourdieu mengenai habitus, arena, modal, kekerasan simbolik, dan *distinction* (pembeda) relevan dimanfaatkan dalam penelitian disertasi ini, dengan pertimbangan; pemikiran konstruktif Bourdieu digunakan untuk menjelaskan asal-usul skema persepsi, pemikiran, dan tindakan serta struktur-struktur sosial sangat bermanfaat untuk mengeksplorasi perempuan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah. Akhirnya, ditemukan jawaban-jawaban tentang faktor-faktor yang mendorong perempuan memenangkan pergulatan dalam pertarungan arena rekrutmen legislatif selama ini di Jawa Tengah. Selain itu, pemahaman teori praktik Bourdieu dapat digunakan sebagai pisau analisis mengenai relasi-relasi yang terjadi di dalamnya, antara habitus dengan *distinction* misalnya.

Kekurangan yang menimbulkan kritik terhadap teori Bourdieu, menjadi perhatian peneliti sehingga penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menutup celah yang selama ini ada.

2.3. Rekrutmen Politik Perempuan

Partisipasi masyarakat yang meningkat, membawa suatu harapan pada meningkatnya kualitas demokrasi. Demokrasi membawa konsekuensi pada terwujudnya keadilan, kebebasan berpendapat dan berserikat oleh semua komponen masyarakat, termasuk perempuan. Lovenduski, menjabarkan kiprah perempuan dalam politik, bagaimana perempuan dan keterwakilan mereka. Pentingnya perempuan dalam berpolitik untuk mewakili kaumnya dalam berpolitik. Perwakilan politik dapat dimengerti sebagai kehadiran anggota-anggota komunitas itu, dalam lembaga-lembaga politik formal. Ia menjelaskan mengapa kesetaraan perwakilan perempuan menjadi penting (Lovenduski, 2008: 35-37).

Rekrutmen oleh partai politik harus dilaksanakan secara demokratis, termasuk rekrutmen terhadap perempuan. Proses rekrutmen demokratis inilah yang diharapkan menjadi *point* yang penting bagi keterlibatan perempuan dalam politik. Langkah pertama rekrutmen politik perempuan melalui kebijakan kuota pada awalnya diharapkan sebagai peluang masuknya perempuan. Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka, dimana setiap individu yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan dan peluang yang sama, duduk dalam sebuah jabatan politik. Sebaliknya, di negara yang tidak demokratis rekrutmen politik biasanya bersifat tertutup. Peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja (Gaffar, 1999: 155-156).

Secara teoritik, bentuk rekrutmen dibagi dua yakni terbuka dan tertutup (Almond & Powell, 1988). Sebagai prosedur dan syarat rekrutmen politik yang terbagi dalam dua bagian dijelaskan yaitu; prosedur tertutup, artinya rekrutmen dalam partai,

dilaksanakan oleh elit partai yang mempunyai kuasa untuk memilih siapapun calon-calon yang mereka anggap layak diberikan jabatan berdasarkan *skill*, kemampuan dan kapabilitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga, prosedur atau tata aturan tersebut dianggap sebagai prosedur tertutup karena hanya ditentukan oleh segelintir orang dan prosedur terbuka; artinya setiap orang memiliki hak untuk memilih, siapapun yang akan menjadi calon pemimpin di dalam negaranya. Selain itu, pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbukadapat disaksikan oleh khalayak.

Kajian mengenai rekrutmen politik perempuan menjadi menarik, searah dengan perkembangan tuntutan pelibatan perempuan dalam politik sejak tahun 1980-an (Gaus & Kukathas, 2012: 622). Pada pertengahan tahun 1980-an, telah terjadi revaluasi peran penting negara dalam strukturasi dan institusionalisasi relasi antara lelaki dan perempuan, juga dalam mendirikan dan menertibkan perbatasan antara ranah publik dan ranah pribadi (Gaus & Kukathas, 2012: 633). Secara teoritik, para feminis liberal berkeyakinan bahwa manusia selain makhluk yang rasional, juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan.

Mary Wollstonecraft sejak abad 18 telah menggugat keberadaan perempuan kelas menengah yang telah menikah di Eropa (1759-1799) digambarkan sebagai sosok yang telah terdiskriminasi oleh masyarakat, karena mereka tidak diberi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri, tidak memiliki kebebasan, mereka dihambat untuk berdiri secara leluasa mengembangkan kemampuan nalarnya, dengan alasan perempuan lebih baik memanjakan diri dan menyenangkan orang lain. Ia berargumen,

jika laki-laki dimasukkan dalam sangkar yang sama seperti perempuan, yang dikurung, maka laki-lakipun akan mengembangkan sifat yang sama seperti perempuan. Artinya, karena perempuan diabaikan kesempatannya untuk mengembangkan kekuatan nalarnya, maka mereka dapat berdiri dengan kemampuan mereka. Mereka akan menjadi manusia bermoral jika diberikan perhatian, motivasi dan komitmen yang lebih. Perempuan akan lepas dari sifat *hipersensitivitas*, emosional, dan narsisme yang ekstrim serta memanjakan diri yang berlebihan. Pendapat Wollstonecraft ini menjawab tulisan JJ.Rousseau dalam "*Emile*" mendeskripsikan bahwa perkembangan rasionalitas adalah tujuan pendidikan yang paling penting adalah untuk laki-laki, namun tidak untuk perempuan (Tong, 1998: 18-20). Menurut Rousseau; laki-laki harus dididik dengan nilai-nilai; pengendalian diri, keberanian, kekuatan mental, dan keadilan. Sedangkan perempuan dididik dengan; kesabaran, kepatuhan, tempramen yang baik dan kelenturan.

Mengenai model rekrutmen politik untuk perempuan, Pippa Norris dan Joni Lovenduski (1995) secara teoritik memberi kerangka dasar untuk memahami rekrutmen legislatif perempuan dalam literatur gender dan politik dengan model penawaran dan permintaan. Artinya, dalam upaya untuk menjelaskan bias sosial jelas dalam kebanyakan legislatif, Norris dan Lovenduski (1995) secara eksplisit mengintegrasikan persoalan gender ke dalam dinamika penawaran dan permintaan yang mencerminkan prasangka langsung dan tidak langsung dari pihak penyeleksi. Menurut Lovenduski kebanyakan sistem demokrasi modern, perekrutan politik merupakan tugas partai-partai politik (Lovenduski, Baudino, Sainsbury, Guadagnini, &

Meier, 2005: 119-120). Para pemilih memilih diantara daftar kandidat yang ditawarkan oleh partai-partai politik. Sistem rekrutmen dalam partai tergantung pada penjaga (*gate keepers*). Proses seleksi dalam rekrutmen mencerminkan bahwa dari sisi penawaran, para kandidat perempuan menuju karir politik, karena dipengaruhi faktor-faktor seperti sumber daya, waktu, uang, pengalaman dan faktor motivasi, keyakinan sangat mempengaruhi perekrutan.

Faktor yang biasanya dimaknai sebagai penghalang atau rintangan perempuan masuk dalam arena politik, biasanya oleh para ahli dikaitkan dengan persoalan gender. Gender adalah konstruksi sosial- kultural mengenai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan (Fakih, 2008:12-13), dimana perempuan diasumsikan sebagai kodrat yang pada dirinya, melekat ketidakadilan dalam hubungannya dengan laki-laki dalam beberapa bentuk, antara lain; subordinasi, marginalisasi, dominasi, stereotipe, beban kerja lebih berat dan banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Joan Scott menjelaskan gender adalah elemen konstitutif dari relasi sosial yang mendasarkan diri pada perbedaan yang dimiliki perempuan dan laki-laki, dan sebuah cara penting untuk mengungkap hubungan kekuasaan (Sastriyani (ed), 2009: 104). Mengenai faktor penyebab perempuan “kurang” berperan, beberapa kajian telah dilakukan. Di Indonesia, seperti halnya yang terjadi di Asia Selatan dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, partisipasi bagi perempuan dalam berpolitik terhambat oleh adanya sistem kepartaian, faktor ekonomi, mitos yang berkaitan dengan stereotip, sosial budaya, konstruksi sosial, segregasi gender dalam bidang pekerjaan dan budaya patriarki (Astuti, 2011: 31).

Realita patriarki yang selama ini dituduh sebagai penyebab utama semakin terpinggirkannya perempuan dalam berbagai akses termasuk dalam berpolitik. Perempuan dalam politik, memperoleh kedudukan yang terpinggirkan dan diremehkan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, gender secara umum digunakan untuk mengurai perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya (Echols dan Shandily dalam Sastriyani, 2009:165). Budaya patriarki sering kali menjadi “tersangka utama” jika dikaitkan dengan pertanyaan mengapa perempuan tidak mengambil bagian dalam kegiatan politik. Faktor keagamaan dan kultural sering sekali digunakan untuk menentukan tingkat representasi perempuan (Tripp & Kang, 2008). Keduanya seringkali disebut para peneliti dan kaum feminisme sebagai faktor penyebab kurangnya perwakilan perempuan. Realitas patriarki dalam masyarakat selama ini dalam beberapa riset terdahulu, dianggap sebagai penyebab semakin terpinggirkannya perempuan dalam berbagai akses termasuk dalam berpolitik. Perempuan dalam politik mendapat kedudukan yang terpinggirkan bahkan diremehkan dalam kehidupan masyarakat. Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya (Echols dan Shandily dalam Sastriyani, 2009:165).

Budaya patriarki yang didukung faktor keagamaan dan kultural sering digunakan untuk menentukan tingkat representasi perempuan (Tripp & Kang, 2008). Kaum feminisme mengidentifikasinya sebagai salah satu faktor penyebab kurangnya perwakilan perempuan. Megawangi menguraikan bahwa pandangan feminisme mengenai ideologi patriarki adalah negatif, dimana ideologi tersebut telah

menempatkan perempuan pada posisi subordinat, yaitu di bawah laki-laki (Fakih, et.al., 2000: 209). Feinman (1986) dalam Ollenburger dan Moore (2002: 195) pun pernah menggambarkan keadaan perempuan dalam sistem patriarki tradisional bahwa laki-laki dari kelas yang memiliki hak istimewa secara tradisional, telah menulis hukum dan menafsirkannya, kerap kali dengan perhatian pokok pada perlindungan keluarga dan komunitas. Keberadaan perempuan sering dianggap “aman” jika berada dan tinggal dalam lingkungan keluarga dan komunitas mereka, sistem patriarki akan melindungi mereka. Perempuan yang menyimpang dari keluarga patriarkis tradisional, akan menderita oleh sistem hukum. Inilah yang juga dituliskan oleh Beauvoir dalam gambarannya mengenai perempuan dalam bukunya *The Second Sex* bahwa perempuan hidup dalam bayang-bayang laki-laki (Tong, 1998: 31).

Seperti halnya Lovenduski juga memaparkan tentang rintangan sosial yang dihadapi oleh perempuan untuk menjadi pelaku politik. Rintangan-rintangan sosial tersebut; *pertama*, sumber daya yang diperlukan untuk memasuki politik yang dimiliki perempuan lebih lemah. Misalnya perempuan lebih miskin daripada laki-laki dan cenderung tidak ditempatkan pada jabatan-jabatan yang mendukung kegiatan politik. *Kedua*, bermacam-macam kekangan gaya hidup mengakibatkan perempuan mempunyai waktu sedikit untuk politik. Keluarga dan kewajiban-kewajiban lain yang menuntut perhatian penuh secara khas dijalankan oleh perempuan mengurangi waktu mereka untuk kegiatan-kegiatan lainnya. *Ketiga*, tugas politik dikategorikan sebagai tugas laki-laki, yang menghalangi kaum perempuan mengejar karier politik dan juga merintangi rekrutmen mereka yang tampil ke depan (Lovenduski, Baudino, Sainsbury,

Guadagnini, & Meier, 2005: 88). Megawangi menguraikan bahwa asumsi feminisme tentang ideologi patriarki adalah negatif, dimana ideologi ini telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat, yaitu di bawah laki-laki (Fakih, et.al., 2000: 209).

Mengenai sistem patriarki, para feminis radikal, melihat bahwa di dalam setiap institusi dan setiap struktur masyarakat yang paling mendasar terdapat sistem penindasan dimana orang tertentu mendominasi orang lain. Struktur penindasan paling mendasar terdapat dalam sistem patriarki, penindasan laki-laki atas perempuan (Ritzer & Goodman, 2004: 432). Budaya patriarki membatasi ruang gerak perempuan, karena dalam kultur patriarki ini mendudukan laki-laki sebagai sosok sentral dengan otoritas utama dalam organisasi sosial (Bressler, 2007). Konstruksi sosial yang terbangun sampai saat ini, masih memandang perempuan sebagai “orang kedua” dalam mengakses kesempatan berpolitik. Hal ini tentunya bukan hal yang menggembirakan untuk saat ini. Feinman (1986) menggambarkan keadaan perempuan dalam sistem patriarki tradisional sebagai berikut.

“Laki-laki dari kelas yang memiliki hak istimewa secara tradisional, telah menulis hukum dan menafsirkannya, kerap kali dengan perhatian pokok pada perlindungan keluarga dan komunitas...Keberadaan perempuan sering dianggap “aman” jika berada dan tinggal dalam lingkungan keluarga dan komunitas mereka, sistem patriarki akan melindungi mereka. Disisi lain, perempuan yang menyimpang dari keluarga patriarkis tradisional, akan menderita oleh sistem hukum.” (Ollenburger dan Moore, 2002: 195)

Demikian dalam masyarakat Jawa, sistem patriarki seringkali hadir tanpa disadari membelenggu dengan dominasi-dominasi mereka melalui nilai-nilai yang telah lama ditetapkan dan “*saru*” atau tabu jika ada pelanggaran oleh perempuan, dan dimaklumi jika itu terjadi pada laki-laki. Perempuan sebagai “*konco wingking*” (Munir, 2004: 123)

masih samar-samar timbul tenggelam, walaupun sekarang perempuan maju dalam berpolitik sebagian besar mereka adalah perempuan-perempuan yang masih memiliki hubungan kekerabatan, petahana, hubungan darah dan keluarga seperti istri, anak, menantu, adik, kakak, ipar, dari politisi-politisi laki-laki sebelumnya.

Keempat adalah faktor yang disebabkan oleh lembaga politik yang ada membuat perempuan kemudian merasa tertarik untuk memasukinya (Soetjipto, 1997). *Kelima*, perempuan kesulitan mengekspresikan diri, mengendalikan diri, *me-management* dan mengekspos kemampuannya dalam berpolitik. Kesulitan juga dialami perempuan ketika mereka harus melakukan *lobby* politik dan merancang strategi berkampanye.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, peneliti mengidentifikasi dan melacak beberapa pendapat ilmiah yang terlontar sebelumnya, berkaitan dengan faktor ini. Misalnya Kertati (2014) yang menyatakan bahwa ketidakberhasilan perempuan parlemen mendulang sukses pada pemilu 2014 salah satunya akibat *performance* yang ditampilkan selama perempuan menjadi anggota DPRD. *Performance* yang dinilai oleh rakyat belum berbuat sesuatu yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Beberapa dugaan itu memang tidak salah, beberapa fakta yang dapat disaksikan di televisi, misalnya acara debat yang mempersoalkan suatu persoalan bangsa yang diikuti anggota parlemen perempuan seringkali menyisakan kekecewaan pada konstituennya, misalnya pernyataan tanpa data, ketidakmengertian akan inti persoalan hingga ketidakpahaman akan kebijakan yang harusnya akrab dengan tugas-tugas mereka. Peran-peran itu terjadi bukan tanpa sebab, ketidaksiapan perempuan ketika memasuki dunia politik, kegagalan untuk segera beradaptasi dengan tugas baru ditambah lagi dengan minat

membaca yang rendah di kalangan anggota parlemen, telah gagal dieksekusi oleh perempuan yang duduk di parlemen.

Perempuan memiliki persoalan dengan sedikitnya aset yang mereka punyai dalam berpartisipasi pada kehidupan politik dan pengambilan keputusan karena kebanyakan perempuan berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali (Astuti, 2011: 30). Bahkan Lovenduski (2008: 88) mengidentifikasi dari 4 rintangan sosial kurangnya perwakilan perempuan, satu diantaranya adalah karena sumberdaya yang diperlukan untuk memasuki politik yang mereka miliki lebih lemah. Pippa Norris dan Joni Lovenduski (1995) menjelaskan secara teoritik, bahwa kerangka dasar untuk memahami rekrutmen legislatif perempuan dalam literatur gender dan politik adalah model penawaran dan permintaan. Efek dari rekrutmen politik gender dapat dilihat baik sebagai sisi penawaran dan efek sisi permintaan. Model rekrutmen ini akan dipengaruhi oleh sistem politik tertentu yang menetapkan aturan main (yang menggabungkan sistem hukum, pemilu dan sistem partai politik) dan dalam konteks partai politik meliputi organisasi partai, aturan, dan ideologi. Secara sederhana diterjemahkan bahwa hasil dari proses seleksi partai politik tertentu dipahami dalam interaksi antara pasokan pelamar yang ingin mengejar karier politik dan tuntutan pemilih (konstituen) berdasarkan pada preferensi, kualifikasi, persepsi kemampuan kandidat menurut pemilih. Mereka menggunakan pendekatan institusionalis, mencoba untuk menggabungkan analisis konteks kelembagaan dan politik yang lebih luas dari perekrutan.

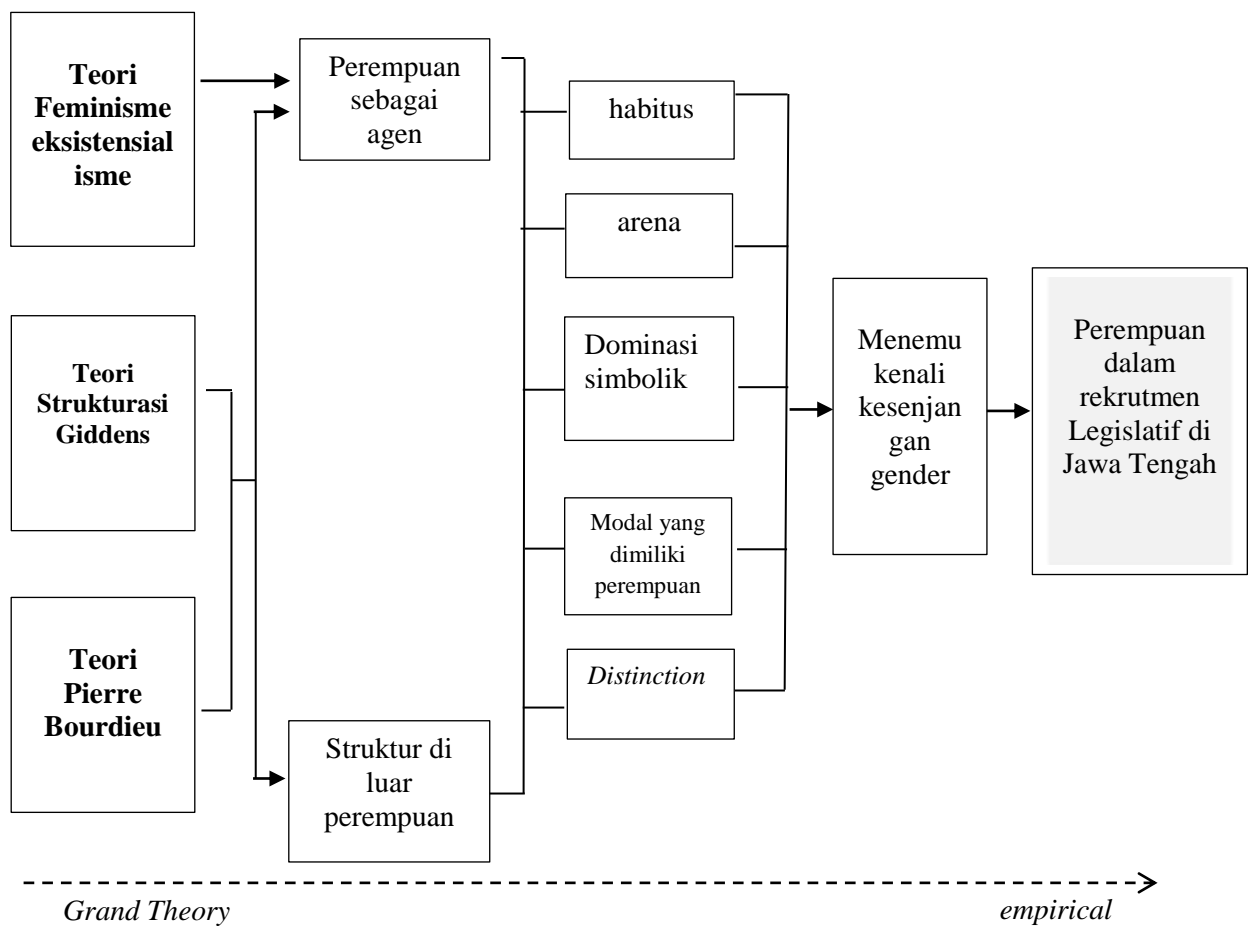
2.4. Bangun Teori

Mengeksplorasi perempuan dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah secara mendalam dapat didekati dengan dua cara yakni mengungkap perempuan sebagai individu (agen) dan struktur di sekitar perempuan. *Affirmative action* yang ditetapkan untuk perempuan dalam politik di Indonesia sampai saat ini, menunjukkan adanya keberpihakan kepentingan-kepentingan perempuan dalam keterwakilan politik. Disinilah, teori feminisme dimanfaatkan untuk “membaca” fakta-fakta sosial yang terjadi dalam proses rekrutmen perempuan dalam politik. Teori agensi-struktur Giddens dan Bourdieu digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Cara berfikir induktif ini juga kemudian membawa peneliti pada *grand theory* dan *core* (dalil-dalil penting) yang berasal dari teori tengahan baru (*middle theory*) dan mengeksplorasi perempuan berhasil dalam pemilihan-pemilihan legislatif dengan menggunakan pisau analisis Teori feminisme, serta teori Giddens dan Bourdieu untuk melihat secara dekat perempuan sebagai agen dan dalam struktur rekrutmen legislatif di Jawa Tengah.

Teori feminisme eksistensialisme menjadi pisau analisis tentang bagaimana perempuan sebagai agen dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah; eksistensi, peran, perjuangan, relasi dan strategi mereka selama ini. Pemikiran kritis Pierre Bourdieu yang mengintegrasikan objektivisme dan subjektivisme, menjadi teori yang dimanfaatkan untuk memperdalam, memperjelas temuan data di lapangan dalam penelitian dengan mempertimbangkan pentingnya mencermati masalah spesifikasi, yakni identifikasi konsep-konsep dan struktur dalil. Atau dengan kata lain,

pertimbangan yang jauh lebih mendasar adalah pada dasar spesifikasi dari teori dan konsekuensi analisis dalam proses pengujian secara empirik (Ihalauw, 2004: 127). Mengeksplorasi perempuan dengan kemampuan, kapabilitas, sumberdaya mereka dalam rekrutmen legislatif di Jawa Tengah dilihat pada Skema 2, di bawah ini.



Skema 2. Bangun teori dalam riset (skema disusun peneliti dengan mengadopsi Salim (2006) dan Ihalauw (2004).

Catatan : ——— diartikan sebagai garis hubung

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis sebagai konsekuensi dari tujuan penelitian, untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang bagi sejumlah individu atau sekelompok orang, dianggap bersumber dari masalah sosial dan kemanusiaan. Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif dalam prosesnya melibatkan upaya-upaya penting, antara lain mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke umum (induktif) dan menafsirkan makna data (Creswell, 2013: 5).